

Daftar Pustaka

A. Buku :

Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji Wakafkan Diri*, Intrans Publishing, Malang, 2016.

Chales Simabura dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantsannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Jakarta, 2005.

Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2004.

, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Patrialis akbar, *Lembaga-Lembaga negara menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Romli Atmasasmita dkk, *Sisi Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pengiat Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

, Konstruksi *Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-XV/2017

C. Jurnal

Bagir Manan, Hak Angket sebagai Kekuasaan Pengawasan DPR, dalam Jurnal Varia Peradilan No. 387 Februari 2018.

Moh Askin, Fungsionalisasi KPK dalam Pemberantasan TIPIKOR Kajian terhadap KPK, dalam Jurnal Varia Peradilan No. 379 Juni 2017

D. Website

<https://www.koran-sindo.com>

E. Skripsi

Dina Fadhillah, 2015, *Kedudukan dan Efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai Lembaga Bantu dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Andalas, Padang.

Gita Aulia Putri, 2016, *Relevansi Independensi Kelembagaan dengan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Andalas, Padang.

